

## TAJUK RENCANA

### Dukung Kejagung Ungkap Kasus Timah

**LANGKAH** Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 banyak mendapat dukungan masyarakat. Kejagung diminta tak gentar menghadapi tekanan dan teror sejumlah oknum aparat yang tidak menghendaki kasus tersebut diungkap.

Yang menarik, pengawal Jampidsus Kejagung berhasil mengamankan salah seorang oknum Densus 88 yang diduga membuntuti Jampidsus saat berada di sebuah restoran. Sayangnya, petinggi Polri belum ada yang memberi keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Bahkan, Kapolri mengaku belum mendapat laporan perihal adanya aparat Densus 88 yang membuntuti Jampidsus. Sebelumnya, Kejagung juga sering menerima teror dari sejumlah orang tak bertanggung jawab.

Teror yang diduga dilakukan aparat Densus 88 tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apa urusannya Densus 88 dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung? Apakah kasus korupsi timah ini melibatkan orang penting di jajaran kepolisian atau pejabat negara? Bukankah Densus 88 bertugas di lingkup pemberantasan terorisme? Wajar bila masyarakat berspekulasi. Apalagi kasus korupsi ini nilainya sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah, atau boleh dibilang kasus terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia.

Masyarakat berhak tahu apa yang sedang terjadi di republik ini. Rakyat juga berhak tahu apakah hubungan antara Kejagung dengan Polri tidak sedang baik-baik saja? Terlepas dari itu, kita

menginginkan agar kasus korupsi timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, diungkap secara transparan. Kita meyakini, masih ada tokoh atau orang penting di balik Harvey Moeis. Siapa orangnya, kita tunggu kerja keras Kejagung untuk mengungkapnya.

Kita mendukung aparat penyidik Kejagung mendapat pengawasan ketat dari TNI, apalagi mereka sudah menandatangani MoU terkait masalah pengamanan. Artinya, pengamanan oleh TNI tidaklah melanggar aturan. Apalagi, ini kasus besar yang mengundang perhatian publik dan sangat mempengaruhi perekonomian negara. Perlu kita ingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus luar biasa.

Bila teror itu berasal dari oknum penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, maka penjelasan dari Kapolri sangat diperlukan, agar jangan sampai terjadi keretakan hubungan antara Kejagung dan Polri. Kedua lembaga negara ini tak boleh berseteru karena akan sangat merugikan negara. Sebaliknya, keduanya harus bekerja sama dalam penegakan hukum, termasuk dalam membongkar kasus mega korupsi timah.

Kalaupun dalam penyelidikan ditemukan indikasi keterlibatan oknum penegak hukum, maka pemimpin tertinggi di masing-masing lembaga penegak hukum ini harus mengambil tindakan tegas, bukan malah menutup-nutupi. Apalagi, saat ini masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Inilah saatnya aparat penegak hukum menunjukkan komitmennya dalam membasmi kejahatan, termasuk memberantas korupsi di semua lini. □-d

## Jika PDIP Menjadi Oposisi

Trisno Yulianto

**RAKERNAS** PDI Perjuangan V telah usai dan partai pemenang pemilu legislatif 2024 dengan perolehan suara 16, 72% (110 kursi di DPR RI) memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran 2024-2029. Sikap tegas PDIP untuk berada di luar pemerintahan cenderung didasari sikap kekecewaan mendalam Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputeri dan *circle elite* PDIP terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak loyal pada kebijakan strategis Partai. Jokowi sebagai kader PDIP tidak mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo- Mahfud MD dan lebih memilih berpihak pada duet Prabowo-Gibran.

Narasi yang disuarakan para juru bicara PDIP seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Haris Sitorus, Masinton Pasarabu, Panda Nababan dan lainnya, menyalahkan Jokowi yang dipersepsikan kader yang mbalelo serta bersikap kacang lupa kulitnya. Karier politik Jokowi yang melesat sejak menjadi walikota Solo, Gubernur DKI dan terpilih menjadi Presiden tahun 2014, dianggap sebagai jasa besar PDIP. Demikian pula sang anak, Gibran Rakabuming Raka menjadi walikota solo dan sang menantu Bobby Nasution menjadi walikota Medan karena diusung PDIP.

Meski pernyataan politis bahwa Joko Widodo lebih banyak berhitung politik kepada PDIP tidak sepenuhnya benar. Mengingat Jokowi sejak mencalonkan diri sebagai walikota solo, gubernur DKI dan Capres memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. PDIP sendiri dalam pemilu 2014 dan 2019 menikmati "lezatnya" efek ekor jas elektoral Pencapresan Jokowi. bahkan PDIP sendiri dalam pemilu legislatif 2004 dan 2009 menjadi pecundang karena kalah dari Partai Golkar dan juga demokrat. Megawati soekarno Puteri juga dua kali dikalahkan SBY dengan telak dalam pilpres 2004 dan 2009.

Jokowi sendiri sebenarnya memiliki andil kuat terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jateng yang awal berambisi menjadi capres PDIP sering diganjil kubu Puan Maharani yang juga berambisi meningkatkan elektabilitas untuk menjadi capres atau cawapres. Jokowi yang juga awalnya men-

nar menjadi oposan yang posisinya vis a vis dengan pemerintah. Menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan akan diuji sejauh mana energi dan stamina PDIP dalam mengawal kritis pemerintah. Demikian kader-kader PDIP harus benar-benar mampu menjadi megaphone vote suara masyarakat. Menjadi blok politik yang efektif mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Dalam input perumusan kebijakan di parlemen. PDIP harus tangguh menjadi kekuatan advokasi atas hak-hak rakyat yang mungkin diciderai oleh kepentingan politik kekuasaan.

Dalam kalkulasi elektoral tentu saja PDIP akan mewakili "kolam suara" masyarakat memilih yang tidak puas akan kinerja pemerintahan Prabowo - Gibran. PDIP menjadi partai yang akan terus menggalang dukungan publik yang mungkin tidak puas dengan berbagai implementasi program pemerintah. Serta mengakumulasi menjadi energi dukungan elektoral dalam pemilu legislatif 2029.



KR-JOKO SANTOSO

jadikan partai berlambang moncong putih banteng gemuk berada di luar pemerintahan dan selalu bersikap kritis terhadap program dan kebijakan pemerintah. Berada di luar pemerintahan selama era SBY memang tidak menguntungkan bagi PDIP karena terlihat dalam pemilu 2009 PDIP digilas Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam perolehan suara dan kursi di DPR.

Jika PDIP menjadi oposisi di era pemerintahan Prabowo- Gibran kemungkinan akan menjadi kekuatan politik yang kritis dan bernarasi keras menolak program serta kebijakan pemerintahan Prabowo- Gibran di

Parlemen. Hal tersebut memiliki basis rekam jejak sejarah ketika elite PDIP begitu kritis dan keras mengkritik berbagai program dan kebijakan pemerintahan SBY. PDIP benar-be-

nar menjadi oposan yang posisinya vis a vis dengan pemerintah.

Menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan akan diuji sejauh mana energi dan stamina PDIP dalam mengawal kritis pemerintah. Demikian kader-kader PDIP harus benar-benar mampu menjadi megaphone vote suara masyarakat. Menjadi blok politik yang efektif mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Dalam input perumusan kebijakan di parlemen. PDIP harus tangguh menjadi kekuatan advokasi atas hak-hak rakyat yang mungkin diciderai oleh kepentingan politik kekuasaan.

Dalam kalkulasi elektoral tentu saja PDIP akan mewakili "kolam suara" masyarakat memilih yang tidak puas akan kinerja pemerintahan Prabowo - Gibran. PDIP menjadi partai yang akan terus menggalang dukungan publik yang mungkin tidak puas dengan berbagai implementasi program pemerintah. Serta mengakumulasi menjadi energi dukungan elektoral dalam pemilu legislatif 2029.

Namun yang patut dicatat peran oposisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran hanya berlaku di pusat. Di daerah kader PDIP yang nantinya terpilih dalam pilkada serentak 19 November 2024 akan cenderung bersikap kooperatif mengingat kepala daerah adalah cermin wakil pemerintah pusat di daerah. Dan gejala politik menjelang pilkada 2024 PDIP akan banyak berkoalisi dengan partai-partai yang di dalam perhelatan pilpres 2024 menjadi lawan. Mengingat kondisi objektif konstelasi politik di daerah sangat dinamis. □-d

\*) **Trisno Yulianto**, Koordinator Forum Kajian Kebangsaan dan Demokrasi.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof/Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

## Strategi Kebudayaan untuk Tata Ruang Kota Yogyakarta

Halim HD

**KOTA** secara klasikal dalam sejarah dimaknai dengan ruang kehidupan masyarakat untuk menciptakan interaksi dalam sistem produksi budaya dalam kaitannya mengembangkan ekosistem berkelanjutan, yang nampaknya kini menghadapi suatu tantangan berat. Kemajuan teknologi dalam konteks sarana transportasi kini menjadi masalah yang paling krusial di dalam mobilitas warga. Ledakan urbanisasi demikian pesat dan pada sisi lain sarana transportasi publik tak cukup memadai. Dampak dari hal itu, meledaknya transportasi pribadi yang berkaitan dengan sistem kredit kendaraan. Dengan kemunculan sarana otomotif yang demikian pesatnya sudah pasti menggeser transportasi tradisional, andong, becak dan sepeda yang sesungguhnya sangat ekologis.

Yogyakarta dahulu dikenal sebagai kota sepeda kini hanya menjadi cerita. Jalanan dipenuhi motor-mobil yang merampas ruas jalan dan ruang parkir. Pada sisi lainnya, ledakan transportasi otomotif di perkotaan membawa dampak kepada polusi udara-suara. Sementara itu, reboisasi, penghijauan sebagai upaya untuk menanggulangi polutan nampak tak seimbang. Pada ujung masalah yang kita hadapi, kita menyaksikan kota mengalami krisis ekosistem yang akut, yang membawa dampak negatif pada pertumbuhan sistem syaraf anak-anak dan remaja.

Tata ruang juga berubah. Latar amba di perkampungan semakin hilang, ruang rendezvous sosial yang dahulu menjadi medium perekat sosial melalui pertemuan dan berbagai upacara kampung, di samping sebagai ruang bermain anak-anak. Bagaimana dengan posisi warga lanjut usia (lansia) yang membutuhkan ruang rendezvous sebagai bagian mereka untuk merekatkan ikatan

sosial dan sekaligus sebagai ruang berbagi masalah personal dan sosial.

Dalam konteks tata ruang perkotaan, menarik apa yang disampaikan oleh kaum lansia pada diskusi buku kumpulan esai 'Kita Lansia, Terus Berkarya, Bahagia dan Penuh Berkah' di ruang Paripurna DPRD DIY, pada 22 Mei 2024. Diskusi yang dihadiri 30-an penulis esai dan lansia yang masih aktif menulis, seperti mantan jurnalis dan sastrawan menyepakati bahwa kondisi tata ruang Yogyakarta membutuhkan solusi strategis dalam kaitannya dengan kesejahteraan kaum Lansia. Dalam diskusi itu kita berharap penataan ruang di perkampungan dan pengembangan latar amba untuk anak-anak dan lansia. Secara singkat kita berharap DPRD beserta instansi terkait merumuskan suatu strategi kebudayaan untuk pengembangan tata ruang yang lebih manusia.

Dalam tata ruang yang budayawi aspek kehijauan tata lingkungan kota merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan karena berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi polutan udara-suara serta meredam peningkatan cuaca yang kian panas. Strategi kebudayaan bagi pengembangan tata ruang kota membutuhkan proses dialog antara pengelola kota dengan warga kampung dan wilayah urban. Dialog itu mengandaikan suatu harapan tentang tata ruang manusiawi yang bisa menciptakan relasi sosial dan personal sebagai wujud dari proses budayawi ke arah peradaban kota yang

ramah bagi lintas generasi. Kita kini berhadapan dengan perubahan sosial yang demikian derasnya dampak dari sistem komunikasi dan arus keputusan politik dari berbagai arah yang menyebar yang secara konkrit bukan tak mungkin menciptakan kesalahpahaman bahkan konflik. Dalam konteks itulah dibutuhkan ruang-ruang publik yang bersifat menciptakan relasi dialogis.

Salah satu aspek strategi kebudayaan di dalam penataan ruang secara ideal menciptakan ruang dialogis sebagai proses yang berkesinambungan dalam relasi personal-sosial sebagai proses kelanjutan menjaga keharmonisan. Dalam kaitan ini pelibatan dan penguatan aktifitas warga memelihara lingkungannya agar ekosistem terjaga dan sekaligus sebagai wujud konkrit interaksi dialog lintas generasi ke dalam harmonisasi sosial. □-d

\*) **Halim HD**, Networker-Organizer Kebudayaan.

## Pojok KR

PDI Perjuangan minta maaf ada kader tak junjung etika.

-- **Siapa dia, masyarakat hanya bisa menebak.**

\*\*\*

Polda Jabar bantah ada anak pejabat terlibat kasus Vina.

-- **Tak cukup membantah, yang penting buktinya.**

\*\*\*

Bongkar korupsi timah, Kejagung dintimidasi dan diteror.

-- **Butuh pengawasan TNI.**